

serta arah hubungan antara variabel pengangguran dan PDRB terhadap tingkat kemiskinan.

Perbedaan hasil penelitian ini menandakan adanya keterbatasan dalam kerangka analisis konvensional yang digunakan, terutama karena model tersebut belum sepenuhnya mampu menangkap kompleksitas dan akar struktural dari kemiskinan di DIY. Dengan demikian, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian yang signifikan, yakni minimnya kajian yang tidak hanya menitikberatkan pada data kuantitatif agregat, tetapi juga menelaah aspek kualitas dari pertumbuhan ekonomi dan struktur ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan sebagai upaya mengisi kesenjangan tersebut melalui analisis ulang terhadap hubungan antarvariabel dengan mempertimbangkan adanya kemungkinan distorsi struktural seperti keberadaan pekerja miskin dan ketimpangan dalam akses terhadap hasil Pembangunan yang selama ini belum terakomodasi secara memadai dalam indikator makroekonomi konvensional.

Ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan menjadi salah satu akar permasalahan yang mendalam terkait kemiskinan di tanah air. Lebih khusus lagi, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang menghadapi tantangan serius dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Masih terdapat ketimpangan pendapatan di wilayah tersebut, menjadikannya sebagai salah satu isu penting yang harus ditangani secara efektif oleh pemerintah daerah. Hingga saat ini, angka kemiskinan di DIY tercatat mencapai 12,28%, menjadikannya sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di seluruh Pulau Jawa. Dengan luas wilayah sekitar 3.185,80 kilometer persegi dan populasi

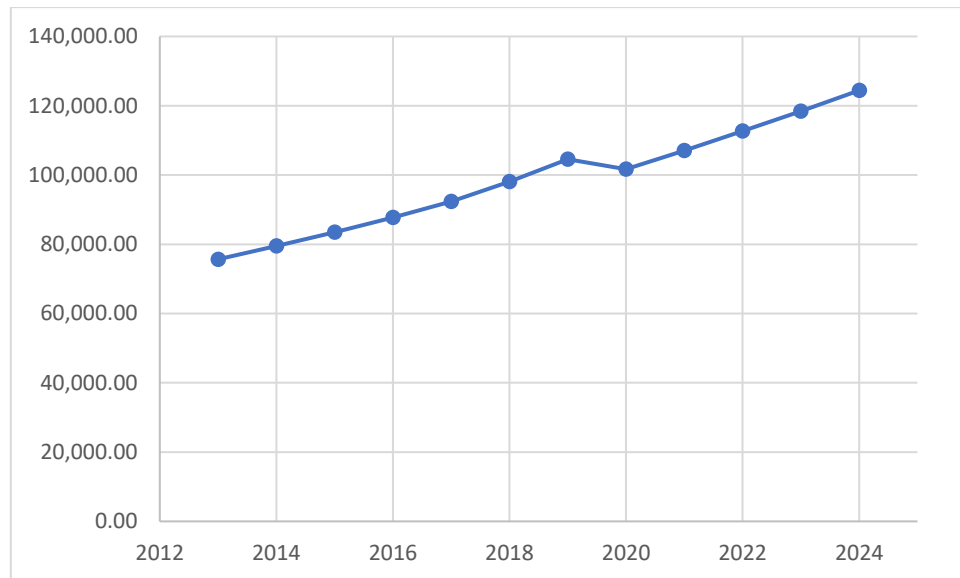
pada tahun 2016 mencapai sekitar 488,83 ribu jiwa dalam kondisi miskin, data ini menunjukkan situasi kritis terhadap kesejahteraan masyarakat lokal (Salsabilla, Juliannisa and Triwahyuningtyas, 2019).

Pada tahun 2020 lalu, meskipun jumlah total penduduk meningkat menjadi 3.298.323 jiwa, jumlah individu dalam kategori miskin masih cukup signifikan yaitu sebanyak 475.720 jiwa. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mengurangi angka kemiskinan selama dekade terakhir, tantangan tetap ada. Pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya aktif untuk memberantas kemiskinan melalui berbagai program dan kebijakan strategis guna meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dalam jangka panjang (Beno, Silen and Yanti, 2022).

BPS berperan penting dalam mengukur kemiskinan di Indonesia melalui pendekatan Basic Needs Approach, yang menilai kemampuan individu atau kelompok memenuhi kebutuhan dasar. Mereka menggunakan berbagai indikator untuk memahami situasi kemiskinan secara menyeluruh. Salah satu alat ukur adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan atau Poverty Gap Index. Indeks ini menunjukkan seberapa jauh pengeluaran rata-rata orang miskin dari Garis Kemiskinan, sehingga tidak hanya mencatat jumlah orang miskin tetapi juga mengukur tingkat kekurangan mereka dibandingkan standar hidup yang layak. BPS menggunakan Headcount Index (HCI) atau Persentase Penduduk Miskin sebagai indikator utama. HCI mengukur proporsi penduduk di bawah Garis Kemiskinan, yang menunjukkan tingkat kesulitan ekonomi dan kondisi kehidupan yang buruk dalam populasi. BPS telah mengembangkan Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) untuk memberikan gambaran lebih luas tentang kemiskinan. IKM tidak hanya mempertimbangkan

pendapatan, tetapi juga akses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan, dan standar hidup. Indeks ini membantu mengidentifikasi jumlah orang yang mengalami kekurangan dalam berbagai indikator kemiskinan sekaligus, sehingga memahami kompleksitas tantangan kemiskinan secara menyeluruh (Piliang, 2023).

Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi D.I.Y

Data ini menunjukkan tren fluktuasi (ketidakstabilan) jumlah penduduk miskin di setiap wilayah, termasuk Kulonprogo, Bantul, Gunungkidul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Secara keseluruhan, dari tahun 2013 hingga 2024, terdapat variasi di jumlah penduduk miskin di setiap kabupaten/kota. Misalnya, Kota Yogyakarta menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin dari 15,5% pada 2013 menjadi 11,1% pada 2024. Namun, ada juga kabupaten seperti Gunungkidul yang mengalami peningkatan pada beberapa tahun tertentu, sebelum akhirnya turun kembali. Tren fluktuasi ini juga dapat terlihat selama periode pandemi COVID-19, di mana jumlah penduduk miskin meningkat signifikan pada 2020 dan 2021 sebelum mengalami penurunan lagi pada 2022 dan 2023. Data ini memberikan

gambaran tentang bagaimana dinamika kemiskinan dapat berbeda di setiap kabupaten/kota dalam satu provinsi, dan bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi, program kebijakan pemerintah, dan situasi sosial lainnya.

Pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi biasanya berhubungan dengan peluang kerja yang lebih baik dan pendapatan yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Namun, pengangguran yang tinggi menjadi masalah signifikan, terutama di kalangan individu yang berpendidikan rendah. Jenis pekerjaan yang tersedia bagi mereka sering kali berisiko dan tidak stabil, yang mengakibatkan ketidakpastian ekonomi dan peningkatan kemiskinan. Orang-orang yang hidup dalam kemiskinan sering kali tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan dan pelatihan, sehingga mereka terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan. Hal ini menyebabkan rendahnya produktivitas dan pendapatan, serta meningkatkan ketergantungan pada bantuan sosial (Sirilius, 2017).

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kemiskinan di suatu daerah. Pendidikan yang baik dan berkualitas dapat meningkatkan kemampuan individu dalam mengakses peluang kerja yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi tingkat kemiskinan. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), meskipun terdapat upaya dari pemerintah untuk meningkatkan belanja pendidikan, tantangan dalam mencapai pendidikan yang berkualitas masih ada. Berdasarkan penelitian, belanja pendidikan di DIY menunjukkan pengaruh positif

dan signifikan terhadap IPM. Namun, terdapat juga indikasi bahwa belanja pendidikan tidak secara langsung mengentaskan kemiskinan (JASMINE, 2014).

Pengangguran dan kemiskinan adalah masalah yang sulit diatasi. Menurunkan pengangguran sama pentingnya dengan mengurangi kemiskinan, karena pengangguran mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat, yang ditentukan oleh pendapatan. Tanpa pekerjaan. Secara Abstrak, ada sebuah konsep yang menyatakan bahwa tingkat kemiskinan dalam suatu masyarakat akan berfluktuasi seiring dengan naik turunnya tingkat pengangguran. Hal ini berarti bahwa ketika jumlah orang yang tidak memiliki pekerjaan meningkat, secara otomatis kita juga dapat mengharapkan adanya peningkatan dalam tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa dalam kenyataannya, hubungan antara pengangguran dan kemiskinan seringkali tidak sepenuhnya sesuai dengan asumsi yang diajukan oleh teori ekonomi konvensional. Dalam beberapa situasi tertentu, terdapat kemungkinan munculnya hubungan yang lebih kompleks dan bahkan terbalik antara kedua faktor tersebut (Anggraini, Fasa and Suharto, 2023)

Sebuah studi dari Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan istilah pengangguran sebagai individu yang berada dalam proses pencarian pekerjaan aktif, sedang mempersiapkan usaha bagi diri mereka sendiri atau bahkan mereka yang tidak lagi mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan satu pekerjaan pun. Selain itu, definisi ini juga mencakup mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai melaksanakan tugasnya secara aktif (BPS, 2015). Dengan demikian, pengertian tentang pengangguran dan kemiskinan menjadi lebih luas dan kompleks daripada sekadar angka-angka

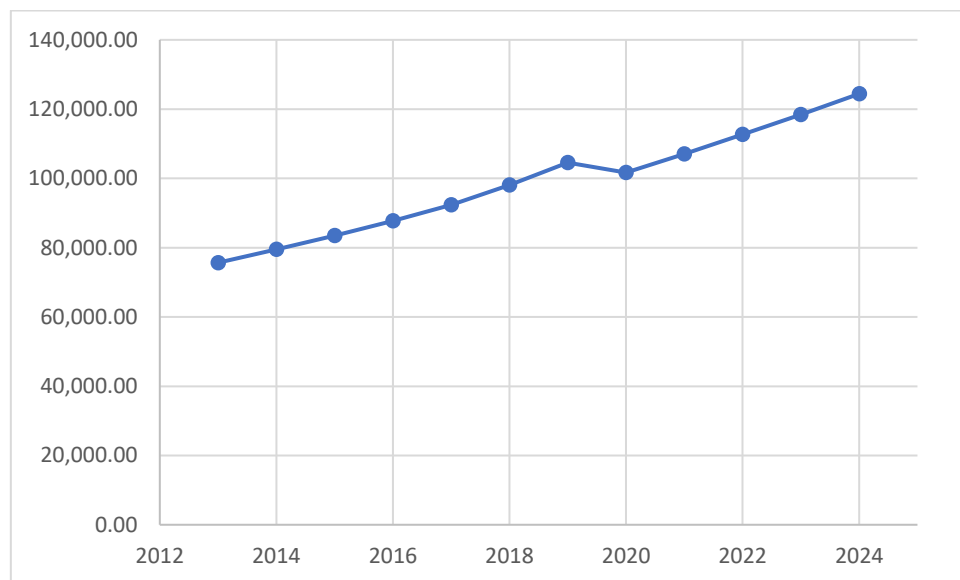
statistik sederhana, keduanya merupakan fenomena sosial ekonomi yang saling berkaitan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor lain di masyarakat.

Tingkat pengangguran memiliki hubungan yang signifikan dengan kemiskinan, terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketika tingkat pengangguran tinggi, banyak individu tidak memiliki pekerjaan dan, akibatnya, tidak memiliki sumber pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hal ini menyebabkan peningkatan angka kemiskinan, karena orang-orang yang tidak bekerja tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pertumbuhan ekonomi memiliki dampak yang kompleks terhadap kemiskinan, dan hubungan ini sangat relevan dalam konteks Daerah Istimewa Yogyakarta (Purnomo, 2019).

Secara umum, pertumbuhan ekonomi yang positif dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dengan menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketika ekonomi tumbuh, sektor-sektor seperti industri, perdagangan, dan jasa biasanya berkembang, yang pada gilirannya menciptakan peluang kerja baru. Pertumbuhan ekonomi tidak selalu merata dan dapat menghasilkan ketimpangan. Jika pertumbuhan ekonomi hanya menguntungkan segmen tertentu dari populasi, misalnya, mereka yang memiliki akses lebih baik terhadap pendidikan dan keterampilan, maka kelompok yang kurang beruntung mungkin tidak merasakan manfaatnya. Dalam konteks Yogyakarta, jika pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan kebijakan yang inklusif, maka bisa jadi ada kelompok masyarakat yang tetap terjebak dalam kemiskinan meskipun ekonomi secara keseluruhan tumbuh, untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berkontribusi pada pengurangan kemiskinan,

diperlukan kebijakan yang mendukung pemerataan hasil pertumbuhan. Ini termasuk investasi dalam pendidikan dan pelatihan, pengembangan infrastruktur, serta program-program sosial yang membantu kelompok rentan (Wahyu, 2024) .

Gambar 1.2 PDRB Daerah Istimewa Yogyakarta 2013-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi D.I.Y

Grafik di atas menunjukkan perkembangan PDRB Kota Yogyakarta dari 2013 hingga 2024, dengan tren peningkatan signifikan yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi pesat. Nilai PDRB konsisten naik dari sekitar 75 miliar hingga hampir 124 miliar, menunjukkan ekspansi ekonomi berkelanjutan di Yogyakarta. Meskipun grafik menunjukkan tren positif, ada penurunan pada tahun 2020, kemungkinan akibat faktor eksternal seperti penyesuaian ekonomi global dan dampak pandemi COVID-19. Pandemi ini mempengaruhi berbagai sektor ekonomi dan PDRB secara keseluruhan. Setelah penurunan tersebut, PDRB meningkat tajam dari 2021 hingga 2024, mencerminkan pemulihan ekonomi pasca-pandemi berkat normalisasi aktivitas ekonomi dan kebijakan pemerintah untuk mempercepat pemulihan. Peningkatan PDRB yang konsisten menunjukkan

pertumbuhan ekonomi positif di Yogyakarta. Namun, perlu dianalisis apakah pertumbuhan ini merata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kemiskinan. Distribusi hasil pertumbuhan tetap penting agar semua lapisan masyarakat bisa merasakan manfaatnya.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam fenomena pengangguran terbuka yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Provinsi ini dikenal memiliki karakteristik unik dalam sejumlah indikator pembangunan manusia, seperti tingkat pendidikan, angka pengangguran, produk domestik regional bruto (PDRB), dan tingkat kemiskinan. Dari segi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), DIY termasuk tinggi dibanding provinsi lain di Indonesia (Salsabilla, Juliannisa and Triwahyuningtyas, 2019).

Hal ini mencerminkan bahwa akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan di wilayah ini tergolong baik. Namun, meskipun tingkat pengangguran di DIY terbilang rendah dan bahkan termasuk yang paling rendah di Pulau Jawa, angka kemiskinan di wilayah ini masih tergolong tinggi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting: bagaimana bisa suatu daerah dengan IPM tinggi dan pengangguran rendah, tetap menghadapi persoalan kemiskinan yang serius? Bisa jadi, ada faktor lain yang belum terlihat secara kasat mata. Misalnya, sebagian masyarakat mungkin tidak lagi aktif mencari pekerjaan karena merasa sudah putus asa. Bisa juga karena banyak pekerjaan yang tersedia tidak memberikan penghasilan layak, sehingga mereka tetap masuk kategori miskin meskipun bekerja. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk menelusuri lebih dalam bagaimana

hubungan antara IPM, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kemiskinan di DIY. Dengan memahami keterkaitan antara ketiga aspek tersebut, diharapkan kita bisa melihat gambaran yang lebih utuh tentang realitas sosial ekonomi masyarakat DIY saat ini (Fathony Dian Nugraha, 2024).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks yang telah disampaikan oleh penulis, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah terdapat pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
- b. Apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
- c. Apakah terdapat pengaruh tingkat PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis terapkan, maka Tujuan Penelitian pada penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- c. Untuk mengetahui pengaruh tingkat PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif , penelitian ini menggunakan data panel yang didapat melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Istimewa Yogyakarta pada periode tahun 2013 – 2024.

Terdapat ruang lingkup masalah yang akan dibahas dalam memfokuskan penelitian ini yaitu :

- a. Pengaruh tingkat PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Pengaruh tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- c. Pengaruh tingkat Pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini akan memberikan beberapa keuntungan, antara lain :

- a. Meningkatkan pengetahuan serta pemahaman baru mengenai dampak tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Menjadi sumber referensi dan pertimbangan yang berguna bagi mahasiswa yang berencana melakukan penelitian dengan isu serupa.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman tambahan bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan dan merumuskan program-program untuk mengatasi masalah kemiskinan, sehingga tingkat

kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bisa menurun dan akhirnya teratasi.